menjelaskan ketentuan-ketentuan yang akan diterapkan pada perjanjian kerjasama bagi hasil pemanfaatan perahu tambangan ini.⁵⁰

Pada awal akad terdapat beberapa ketentuan yang diterapkan dalam perjanjian kerjasama bagi hasil, antara lain:⁵¹

1. Pada awal perjanjian, modal usaha ditanggung seluruhnya oleh Alwi yang dimana dalam hal ini bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan Supriadi sebagai pengelola tidak dibebankan apapun selain waktu dan keahliannya dalam mengelola usaha yang akan dilakukan.
2. Jenis dan tempat usaha telah ditentukan oleh pemiik modal, jenis usahanya adalah Tambangan perahu penyeberangan jalan..
3. Alat-alat tambang serta keperluan lainnya telah disediakan oleh pemilik modal dan menjadi tanggungan pemilik modal dalam perjanjian kerjasama bagi hasil.
4. Tempat usaha yang telah ditentukan, biaya lainnya dan gaji karyawan ditanggung oleh pemilik modal.
5. Persentase keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah 50 persen untuk pemodal dan 50 persen untuk pengelola.
6. Bagi hasil dilakukan setiap akhir bulan, yang dimana pada saat bagi hasil pemilik modal memisahkan biaya-biaya lainnya untuk keperluan usaha

⁵⁰ Wawancara Dengan Alwiansyah, Sebagai Pemilik Modal, pada tanggal, 22 Januari 2024.

⁵¹ Ibid.

Ketentuan-ketentuan diatas telah disepakati dan dilaksanakan berdasarkan kerelaan atas kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak lain. Sebagaiman yang dijelaskan Bapak Sulaiman selaku Ketua RT 17, beliau menjelaskan:

“Kerjasama bagi hasil ini dilakukan di Lingkungan Randulawang kecamatan semen yang berlokasi di tanah sekitar Bapak Alwi. Kerjasama bagi hasil ini dilakukan atas dasar kekeluargaan dan niat membantu Supriadi, yang dalam hal ini melalui jalur musyawarah di kediaman Bapak Sulaiman.”⁵²

Pelaksanaan kerjasama bagi hasil dalam penerapannya terdapat beberapa perubahan dan pengalihan tentang hak-hak serta kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian tersebut, yaitu Alwi sebagai pemilik modal dan Supriadi sebagai pengelola modal. Perubahan serta pengalihan hak-hak tidak tercantum dalam ketentuan- ketentuan yang telah disepakati di awal akad, perubahan tersebut juga tidak melibatkan kedua belah pihak melainkan hanya satu pihak yang melakukan perubahan terhadap akad tersebut.⁵³ Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Alwi, beliau menjelaskan:

“Bertambahnya pelanggan/penumpang setiap harinya maka layanan terhadap jasa pelintas menggunakan perahu semakin tinggi dan kebutuhan alat-alat untuk keamanan juga otomatis bertambah, serta keberhasilan Supriadi dalam mengelola usaha. Faktor inilah yang mendorong untuk merubah ketentuan-ketentuan awal tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Supriadi.”⁵⁴

⁵² Wawancara Dengan Sulaiman, Sebagai Ketua RT 07 Dusun Karangdoro, pada tanggal, 22 Januari 2024.

⁵³ Wawancara Dengan Alwiansyah, Sebagai Pemilik Modal, pada tanggal, 22 Januari 2024.

⁵⁴ Ibid.

Dalam hal ini yang melakukan perubahan secara sepihak adalah Alwi selaku pihak pemilik modal, kemudian tentang hak-hak dan kewajiban para pihak yang dimana dalam hal ini yaitu pemilik modal dan pengelola terdapat perubahan dan pengalihan, ketentuan awal modal ditanggung seluruhnya oleh pihak pemodal yaitu Alwi. Kemudian biaya-biaya lainnya yang diperlukan untuk kepentingan usaha tersebut seperti biaya listrik, bahan bakar, oli mesin dan gaji operator (orang yang membantu pengelola) juga ditanggung oleh pemilik modal. Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama saudara Pondan yaitu:

“Dalam kerjasama bagi hasil ini yang melakukan akad sepihak adalah Bapak Alwi. Dalam kerjasama bagi hasil beliau merubah ketentuan-ketentuan awal akad terkait persentase bagi hasil dan hak serta kewajiban para pihak yang terkait”.⁵⁵

Ketentuan-ketentuan tersebut yang menjadi tanggung jawab pihak pemodal beralih menjadi tanggung jawab pihak pengelola tanpa ada persetujuan dari pengelola. Ketentuan-ketentuan yang dijelaskan pada awal akad semuanya mengalami perubahan, baik dari segi persentase keuntungan maupun tanggung jawab pemodal. Persentase yang didapatkan Alwi yang semulanya 50% berubah menjadi 70% dan Supriadi yang awalnya 50% menjadi 30%, serta tanggung jawab pemodal beralih menjadi tanggung jawab pihak pengelola seperti rokok

⁵⁵ Wawancara Dengan Fudin alias Pondan, Sebagai Pengelola, pada tanggal, 22 Januari 2024.

uang kopi dan uang makan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Bapak Supriadi, beliau menerangkan:

“Ketentuan-ketentuan yang dijelaskan di awal akad semuanya mengalami perubahan, baik itu dari segi persentase bagi hasil maupun hak dan tanggung jawab para pihak. Serta perubahan pada ketentuan- ketentuan tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari Supriadi.”⁵⁶

Sebagaimana yang dijelaskan Supriadi selaku pengelola, awal mula perjanjian ini dilakukan atas dasar bahwa Alwi ingin membantu Supriadi untuk belajar berbisnis. Kemudian Supriadi hanya menjalankan usaha tersebut karena Alwi telah menentukan jenis usaha dan tempat yang akan dijadikan usaha. Dalam perjanjian Supriadi hanya memberikan keahlian dan waktunya dalam menjalankan usaha tersebut, semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁵⁷

Pada akhir bulan November 2019, terjadi perubahan pada ketentuan-ketentuan yang disepakati di awal tanpa sepengetahuan Supriadi sebagai pihak pengelola. Perubahan-perubahan yang terjadi pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati meliputi perubahan pada persentase bagi hasil, serta pengalihan hak-hak dan kewajiban. Perubahan pada persentase bagi hasil, yang dimana pada ketentuan awal perjanjian yaitu 50% untuk Alwi dan 50% untuk Supriadi, kemudian

⁵⁶ Wawancara Dengan Supriadi, Sebagai Pengelola, pada tanggal, 22 Januari 2024.

⁵⁷ Ibid.

berubah menjadi 70% untuk Alwi dan 30% untuk Supriadi. Pengalihan hak dan kewajiban, yang di mana menjadi kewajiban Alwi yang bertanggung jawab dalam membayar biaya listrik, bahan bakar, oli mesin dan gaji operator berubah menjadi tanggung jawab Supriadi. Pembayaran ini dibayarkan setelah Alwi dan Supriadi melakukan bagi hasil terhadap perjanjian tersebut.⁵⁸

Menurut Supriadi, perubahan pada persentase bagi hasil dan pengalihan hak- hak dan kewajiban tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Bagian yang tidak sesuai dalam perjanjian ini adalah ketidak ikut sertaan dirinya dalam memutuskan perubahan-perubahan tersebut, sedangkan Supriadi merupakan pihak yang melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil tersebut dan dirinya berhak diikuti sertakan dalam setiap pengambilan keputusan yang ditetapkan untuk kepentingan usaha.⁵⁹

Setelah Alwi melakukan perubahan terhadap persentase bagi hasil dan menyerahkan semua kewajiban seperti membayar biaya listrik, biaya gaji operator, dan tanggungan biaya lainnya, persentase bagi hasil diawal kesepakatan yaitu 50% yang didapat Supriadi merupakan penghasilan bersih. Setelah mengalami perubahan terhadap persentase bagi hasil dan pengalihan kewajiban, dimana persentase awal bagi

⁵⁸ Observasi Lanjutan Usaha Tambangan penyeberangan jalan di Dusun Karangdoro Desa Bulu pada Tanggal 22 Januari 2024.

⁵⁹ Wawancara Dengan Supriadi, Sebagai Pengelola, pada tanggal, 22 Januari 2024.

hasilnya 50% dan berubah menjadi 30% yang merupakan penghasilan kotor, karena Supriadi harus membagi penghasilan tersebut untuk gaji operator, biaya listrik, dan biaya lainnya. Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti Bersama Bapak Supriadi yaitu

“Setelah dilakukannya perubahan pada ketentuan- ketentuan akad, penghasilan yang didapatkan merupakan penghasilan kotor. Beliau harus membagi penghasilan tersebut untuk kepentingan usaha.”⁶⁰

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Saudara Pondan selaku operator yaitu:

“Dalam kesepakatan awal perjanjian kerjasama ini, persentase keuntungan bagi hasilnya adalah 50%:50%, antara Bapak Alwi dengan Saudara Supriadi.”⁶¹

Pada perjanjian awal, ketentuannya antara lain

1. Seluruh modal dikeluarkan Alwi sebagai pemilik modal.
2. Alwi menanggung biaya listrik dan gaji operator.
3. Persentase keuntungan dibagi 50%:50%.
4. Bagi hasil dilakukan setiap akhir bulan.
5. Bagi hasil dilakukan setelah dikurangi biaya lainnya, dan barulah dibagi untuk kedua belah pihak.

⁶⁰ Ibid.

⁶¹Wawancara Dengan Fudin alias Pondan, Sebagai Pengelola, pada tanggal, 22 Januari 2024.

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Supriadi dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu

Semua biaya keperluan lainnya ditanggung oleh Bapak Alwi, sementara bagi hasilnya dilakukan setiap akhir bulan, setelah dikeluarkan biaya lainnya barulah dibagi keuntungan tersebut berdasarkan persentase awal perjanjian.⁶²

Setelah mengalami perubahan persentase dan pengalihan hak dan kewajiban:

1. Persentase bagi hasil berubah, yaitu 70%:30%. Alwi mendapat 70% dan Supriadi mendapat 30% dari bagi hasil.
2. Kewajiban pemodal untuk membayar biaya listrik dan gaji operator beralih menjadi tanggung jawab pengelola.
3. Bagi hasil yang dilakukan merupakan bagi hasil kotor.

Berikut merupakan ketentuan penerapan bagi hasil pada awal akad dan setelah mengalami perubahan pada persentase dan pengalihan.⁶³

1. Bagi Hasil Pada awal akad

$$\text{Omzet/hari} \times 1 \text{ bulan (30 hari)} = \text{pendapatan/bulan} - (\text{biaya listrik, gaji operator, dan biaya lainnya}).$$

⁶² Wawancara Dengan Supriadi, Sebagai Pengelola, pada tanggal, 22 Januari 2024.

⁶³. Wawancara Dengan Alwiansyah, Sebagai Pengelola, pada tanggal, 22 Januari 2024.

Sisanya baru dibagi sebagai keuntungan kedua belah pihak, menggunakan persentase awal yaitu 50% untuk Bapak Alwi dan 50% untuk Bapak Alwi.

2. Bagi hasil setelah mengalami perubahan persentase dan pengalihan.
 $\text{Omzet/hari} \times 1 \text{ bulan (30 hari)} = \text{pendapatan/bulan}$.

Bagi hasil langsung dikeluarkan tanpa mengurangi biaya listrik, gaji operator dan biaya lainnya.⁶⁴

Alwiansyah selaku pemilik modal sekaligus pemilik usaha Tambang perahu penyebrangan jalan, menjelaskan pada awal perjanjian dan ketentuan-ketentuan tersebut dilakukan karena Alwi memang ingin membuka usaha tambangan perahu tersebut dan ingin membantu Supriadi untuk belajar bekerja. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sulaiman dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

“Bahwa memang Alwi ingin membuka usaha tambangan perahu tersebut sekaligus ingin membantu Supriadi dalam tatacara bekerja”.⁶⁵

Setelah usaha penggilingan berjalan lebih kurang 11 bulan, usaha penggilingan batu emas intan bulaeng mengalami

⁶⁴ Observasi Lanjutan Usaha Tambangan penyebrangan Jalan di Dusun Karangdoro Desa Bulu, Tanggal 22 Januari 2024

⁶⁵ Wawancara Dengan Sulaiman, Ketua RT 07 Dusun Karangdoro, pada tanggal, 22 Januari 2024.

perkembangan yang pesat sehingga hasil usahanya pun menjadi lebih besar dari sebelumnya. Sehingga Alwi bermaksud untuk mengalihkan kewajiban yang biasanya ditanggung oleh Alwi ke Supriadi, karena disamping penghasilan usaha yang semakin besar, Supriadi pun sudah memiliki kemampuan dalam mengelola usaha sendiri, walaupun persentase keuntungan berubah.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Bapak Alwi yaitu

"Perubahan pada ketentuan-ketentuan akad tersebut dilakukan karena keberhasilan Supriadi dalam mengelola usaha tambang perahu penyeberangan jalan serta usaha yang mengalami perkembangan yang pesat."⁶⁶

Seperti yang dijelaskan Alwi selaku pemilik modal mengenai alasan beliau melakukan perubahan pada persentase bagi hasil serta pengalihan hak dan kewajiban, adalah karena bisnis usaha tambangan perahu sudah mengalami kemajuan, sehingga Alwi merasa bahwa Supriadi sebagai pengelola tambangan penyeberangan jalan telah berhasil mengelola bisnis tersebut sampai sekarang dan mendapat keuntungan yang yang besar. Alasan lain yang diungkapkan Alwi adalah karena usaha penggilingan batu emas telah mendapat keuntungan yang besar, maka keuntungan yang mereka dapat juga semakin tinggi. Kemudian mengenai perubahan persentase bagi hasil, adalah karena Alwi masih memiliki kewajiban untuk memenuhi persediaan alat-alat penggilingan dan mesin penggilingan untuk usaha yang dikelola oleh Supriadi, dan karena tingkat permintaan jasa semakin tinggi maka persediaan alat dan mesin penggilingan yang disediakan juga harus lebih banyak. Sehingga Alwi merasa bahwa ia berhak mendapatkan 70% dari bagi hasil tersebut.⁶⁷

⁶⁶ Wawancara dengan Alwiansyah, Sebagai Pemilik Modal, pada tanggal 22 Januari 2024.

⁶⁷ Ibid.

Dalam wawancara yang di dilakukan oleh peneliti bersama Ustadz Arif yaitu:

“Sangat disayangkan sikap dari saudara Alwi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara sepihak, perjanjian kerjasama ini masih tidak sesuai dengan kode etik Hukum Islam, padahal hukum Islam telah menjelaskan bahwa apabila hendak mengambil keputusan maka lakukanlah dengan cara *musyawarah* dan haram hukumnya apabila keduanya saling berkhianat. Semua ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerjasama bagi hasil yang berlaku di usaha penggilingan batu emas intan bulaeng harus sesuai dengan hak dan kewajiban antara pemilik dengan pengelola, sebagaimana yang telah diuraikan di awal akad perjanjian. Keuntungan harus dibagi berdasarkan kesepakatan awal yaitu 60%:40% dan tanggungan biaya lainnya ditanggung oleh pemilik modal sesuai dengan kesepakatan awal perjanjian.⁶⁸

Dalam hal ini Islam mensyariatkan *mudharabah* sebagai wadah untuk tolong menolong saling menguntungkan bagi pemodal dan pengelola (*mashlahah*). *Mashlahah* dapat dicapai dalam bermudharabah dengan memenuhi prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam, termasuk didalamnya tentang prinsip keadilan yang harus dipedomani dalam menetapkan persentase (*nisbah*) bagi hasil *mudharabah* tersebut. Penetapan persentase bagi hasil (*nisbah*) oleh salah satu pihak yang bermudharabah tentu saja boleh jika terpenuhi unsur keadilan di dalamnya, sebaliknya apabila ditetapkan sepihak dan tidak adil maka *mudharabahnya fasid* atau batal.

⁶⁸ Wawancara Dengan Arif, Tokoh Masyarakat Dusun Karangdoro, pada tanggal, 22 Januari 2024.

BAB V

PEMBAHASAN

A. TINJAUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA BAGI HASIL DALAM PENGELOLAAN TAMBANGAN PEYEBRANGAN JALAN

Kerjasama bagi hasil adalah suatu akad atau perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian ini ialah pihak pemilik modal atau yang disebut sebagai *shahibul mal* dan kemudian pengelola disebut sebagai *mudharib*. Pemilik modal dalam perjanjian ini berkewajiban memberikan seluruh modal untuk usaha, sedangkan pengelola modal berkewajiban memberikan waktu, keahlian dan tenaganya dalam menjalankan usaha. Ketentuan dalam hal keuntungan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan yang telah ditetapkan bersama. Sedangkan apabila terjadi kerugian, kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal yang dikurangi dari modal awal selama kerugian tersebut bukan berasal dari kelalaian pihak pengelola modal. Jika kerugian terjadi karena kelalaian dari pihak pengelola modal, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak pengelola yang dikurangi dari bagi hasil yang diterima.

Praktik kerjasama bagi hasil ini biasa diterapkan dalam kehidupan masyarakat, seperti yang terjadi dipenggilingan di Penggilingan Batu Emas Intan Bulaeng Desa Seloto, yang dimana Alwi bertindak sebagai

pemilik modal dan Supriadi sebagai pengelola modal. Dalam praktik kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh Alwi dan Supriadi pada awalnya berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan syariat Islam. Perjanjian yang dilakukan oleh Alwi dan Supriadi merupakan perjanjian yang dilakukan secara lisan, sistem kerjasama bagi hasil yang diterapkan adalah *mudharabah muqayyad* yang dimana semua modal disediakan oleh pemilik modal, jenis, waktu dan tempat usaha telah ditetapkan oleh pemilik modal. Sehingga perjanjian kerjasama bagi hasil ini merupakan perjanjian bagi hasil yang terikat yang mengharuskan pihak pengelola modal hanya menjalankan usaha yang telah disediakan oleh pihak pemilik modal.

Sebelum melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil, Alwi sebagai pemilik modal dan Supriadi sebagai pengelola modal telah membuat beberapa ketentuan. Berikut ketentuan-ketentuan yang telah disepakati antara lain:

1. Awal perjanjian, modal usaha ditanggung seluruhnya oleh Alwi yang dalam ini bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan Supriadi sebagai pengelola modal tidak dibebankan apapun selain waktu, keahlian dan tenaganya dalam mengelola usaha yang akan dilakukan.
2. Jenis dan tempat usaha telah ditentukan oleh pemilik modal, jenis usahanya adalah penggilingan batu emas.